

GERAKAN DI/TII DI SULAWESI SELATAN DALAM KAJIAN SUMBER SEJARAH LISAN 1950-1965 (DI/TII MOVEMENTS IN SOUTH SULAWESI THE STUDY ORAL HISTORY SOURCES OF 1950-1965)

Sahajuddin, Abdul Hafid, Rosdiana Hafid

Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Selatan

saj.sahajuddin@yahoo.com

Abstract

This study attempts to describe and explain the views, experiences, and attitudes of oral sources during the DI / TII movement under the leadership of Abdul Kahar Muzakkar in South Sulawesi. The method used is the historical method in general that explains the problem based on a historical perspective, especially oral history, without ignoring other data sources. The results of the study showed that the cause and effect of the DI / TII movement in South Sulawesi was an accumulation of various factors that led to Abdul Kahar Muzakkar's disappointment. Verbal sources also revealed, but the frustration was just momentum, another reason according to some verbal sources was because of the strength and influence of the communists in the community and the TNI, including in South Sulawesi. That is what must be cleared up in Sulawesi, but instead becomes a source of widespread and prolonged conflict. The impact is comprehensive, while the rescue of the people of South Sulawesi during the movement, also varied. The completion of the movement was very complicated because many DI / TII troops were loyal, but many also turned; TNI officers who tried to defeat him, among them were his comrades in arms, they also managed to approach the aristocrats and the scholars, the people of South Sulawesi were supportive. Although finally, the DI / TII movement could be crushed using cultural approaches through officers from aristocratic ethnic groups.

Keywords: *DI/ TII Movements, Verbal Resources, Communist, Rescue*

Abstrak

Kajian ini mencoba menguraikan dan menjelaskan pandangan, pengalaman dan sikap para sumber lisan pada masa pergerakan DI/TII di bawah pimpinan Abdul Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan. Metode yang digunakan adalah metode sejarah pada umumnya yang menjelaskan persoalan berdasarkan perspektif sejarah, khususnya sejarah lisan tanpa mengabaikan sumber data lainnya. Hasil kajian menunjukkan bahwa sebab akibat gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan merupakan akumulasi dari berbagai faktor yang berujung pada bentuk kekecewaan Abdul Kahar Muzakkar. Sumber lisan juga mengungkapkan hal itu, namun kekecewaan itu hanyalah momentum, tetapi alasan lain menurut beberapa sumber lisan karena adanya kekuatan dan pengaruh komunis masuk dalam kelompok masyarakat dan TNI, termasuk di Sulawesi Selatan. itulah yang harus dibersihkan di Sulawesi, tetapi malah menjadi sumber konflik yang melebar dan berkepanjangan. Dampaknya sangat luas, sementara penyelamatan diri bagi masyarakat Sulawesi Selatan pada masa pergerakan, juga beragam. Penyelesaian gerakanpun sangat rumit karena pasukan DI/TII banyak yang setia tetapi banyak juga yang membelok; Perwira TNI yang berusaha menumpasnya, diantaranya adalah teman seperjuangannya, mereka juga berhasil mendekati para bangsawan dan para ulama, masyarakat Sulawesi Selatan banyak yang mendukung. Walaupun akhirnya gerakan DI/TII dapat ditumpas dengan mempergunakan dan pendekatan budaya melalui perwira dari golongan bangsawan etnisnya.

Kata Kunci: Gerakan DI/TII, Sumber Lisan, Komunis, Penyelamatan

PENDAHULUAN

Indonesia dibentuk dan dibangun dengan penuh semangat nasionalisme yang tinggi dari berbagai daerah, etnis, agama dan golongan. Perbedaan itu mestinya menjadi landasan berpikir untuk membangun republik ini. Namun perbedaan kurang tampak dalam pembangunan di setiap daerah, tetapi yang ditonjolkan adalah keseragaman. Sehingga banyak tokoh-tokoh yang berselisih paham tentang bentuk negara dan cara membangunnya. Sejak Indonesia merdeka, kita sering terusik oleh adanya keinginan daerah lain untuk memisahkan diri dan adanya gerakan-gerakan yang ingin mengganti falsafah pancasila dengan falsafah yang lain, salah satunya adalah gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan. Ironisnya, karena kasus-kasus itu terjadi setelah ke-Indonesia-an kita terealisasi dan telah diproklamasikan sebagai wujud dari jiwa nasionalisme.¹

Kasus konflik di berbagai daerah cukup memberi isyarat betapa pentingnya kearifan untuk memberi solusi yang dapat menyentuh akar kulturalnya. Tidak mesti diseragamkan tetapi harus merawat perbedaan sebagai identitas lokalitasnya, sekaligus menjadi identitas nasional. Penyeragaman itu sangat penting asal tidak memporak-porandakan identitas dan kearifan lokalnya. Walaupun juga harus disadari bahwa identitas dan kearifan lokal bukanlah benda mati yang statis dan tidak akan mengalami perubahan tetapi biarlah zamannya yang menjawab perubahan itu sendiri. Ke-Indonesia-an kita telah teruji dalam perjuangan pra dan pasca kemerdekaan, mereka menyadari pentingnya persatuan Indonesia. Sejarah juga membuktikan persatuan Indonesia terwujud dalam solidaritas perjuangan yang fokus kepada musuh bersamanya, yaitu penjajahan harus dihapuskan.

Bukti lain dari perjuangan dengan tujuan yang sama adalah muncul dan berkembangnya organisasi kelaskaran yang bergerilya dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada masa itu. Kemudian perjuangan itu, mendapat dukungan dari rakyat Indonesia. Dukungan itu berbeda-beda pada setiap daerah, ada yang melakukan proteks, ada yang melakukan perlawanan gerilya dan kontak senjata, ada yang melakukan pembakaran dan pemusnahan pos-pos Belanda. Ada juga yang melakukan perjuangan lewat diplomasi sehingga lahirlah perjanjian Linggar Jati (10-15 November 1946), Perjanjian Renville (25 Agustus 1947) sampai perjanjian Roem Royem (28 februari 1949). Semangat dan gejolak perjuangan di seluruh Indonesia dianggap sebagai perjuangan yang revolusioner.

Salah satu daerah yang gigih melakukan perjuangan kemerdekaan Indonesia adalah Sulawesi Selatan, bahkan perjuangannya dianggap sangat revolusioner dan itu diakui oleh Belanda. Tetapi Belanda juga sangat intensif untuk menguasai kembali Indonesia dengan persenjataan lengkap, dan berbanding terbalik dengan persenjataan Indonesia yang menyebabkan perjuangan kita mudah dikalahkan. Tetapi para pejuang daerah ini tidak tinggal diam tetapi terus berjuang dan menjalin kerja sama dengan daerah lain. *Salah seorang yang tampil berjuang pada masa itu adalah Abdul Kahar Muzakkar. Ia tampil sebagai pemimpin pasukan dari orang-orang seberang yang ada di Jawa dan kemudian oleh Markas Besar Tentara, ia diberi pangkat perwira menengah, Letnan Kolonel. Tampilnya Abdul Kahar Muzakkar sebagai salah seorang tokoh utama dalam periode Perang Kemerdekaan (1945-1949). Ia tampil sebagai pemimpin, sehingga hampir dipastikan bahwa Andil Abdul Kahar Muzakkar dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia sangat besar.*²

Gerakan yang dilakukan oleh Abdul Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan dan gejolak-gejolak daerah lainnya adalah salah satu bukti bahwa pemerintah pusat masih memiliki pekerjaan besar pada masa itu untuk memperlakukan dan memberi rasa

keadilan anak bangsanya. Kejadian itu semakin memprihatinkan karena penanganannya berlarut-larut sampai puluhan tahun dan menelan korban jiwa yang tidak sedikit. Gerakan dan konflik itu hanya terpola antara pemerintah bersama TNI-nya dengan Abdul Kahar Muzakkar bersama DI/TII-nya. Hampir dipastikan bahwa alasan-alasan yang banyak mencuak dan berkembang dalam masyarakat adalah kekecewaan Abdul Kahar Muzakkar, terkait dengan perlakuan para gerilyawan yang telah berjuang pada masa revolusi (1945-1949).

Para pejuang atau gerilyawan berkontribusi besar dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, dan bukan hanya berjuang di Sulawesi Selatan tetapi juga di Jawa.³ Namun perjuangan mereka menjadi bola panas ketika Abdul Kahar Muzakkar sebagai Komandan Komando Groep Seberang melakukan reorganisasi pasukan gerilyawan. Atas reorganisasi itu, para gerilyawan berhasil melakukan konferensi Maros yang menghasilkan pembentukan satu organisasi gabungan dari berbagai kelaskaran di Sulawesi yang dikenal dengan KGSS (Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan) pada 17 Agustus 1949.⁴

KGSS inilah yang menjadi titik balik perjuangan Abdul Kahar Muzakkar, antara menuju puncak karirnya sebagai militer profesional atau menuju kehancurannya sebagai pejuang kemerdekaan yang kesiangan. KGSS memang bukanlah bentukan Kahar tetapi atas perintah dan inisiatifnya⁵ mewakili kepada Saleh Sahban. Mereka melakukan reorganisasi gerilyawan untuk menghadapi kemungkinan terburuk dari hasil Konferensi Meja Bundar di Belanda. Jadi tujuan utama reorganisasi itu adalah menghadapi hasil terburuk KMB. Dalam usaha itu Letnan Satu Saleh Sahban segera menghubungi komandan-komandan laskar sesampainya di Sulawesi Selatan, dan ternyata berhasil baik. Pada bulan Agustus 1949 di dalam suatu konferensi komandan-komandan laskar yang dilakukan di Maros, terbentuklah Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan (KGSS). Organisasi ini memiliki kekuatan sebanyak 10 batalyon. Apa yang dilakukan oleh Letnan Satu Saleh Sahban, disamping berhasil menyatukan semua gerilyawan di Sulawesi, juga berhasil membuat tuntutan kepada pemerintah untuk masa depan KGSS.

Sesungguhnya tidak ada masalah atas terbentuknya KGSS, dan malah sangat menguntungkan untuk menghadapi hasil terburuk KMB. Tetapi yang menjadi titik permasalahan besar adalah tuntutan hasil konferensi Maros itu. Keputusan KGSS dengan 10 batalyon itu, ingin dijadikan satu atau dijelmakan menjadi Divisi Hasanuddin dengan menetapkan Kahar sebagai Komandan Divisi atas jasa-jasanya selama masa perjuangan kemerdekaan.⁶ Namun keputusan KGSS untuk dapat diterima secara utuh (keseluruhan) masuk menjadi APRI dalam satu Divisi yang diberi nama Divisi Hasanuddin tidak diterima oleh Komandan Komando Teritorium Tentara VII Wirabuana. KGSS sebagai anggota gerilya hanya dapat diterima perbatalyon. Abdul Kahar Muzakkar setelah ditunjuk sebagai pimpinan Brigade atau Divisi Hasanuddin berdasarkan konferensi tersebut menjadi apresiasi kebanggaan dan kepuasan tersendiri baginya. Kemudian beliau ditugasi untuk memuluskan keputusan itu, tetapi sayang rencana itu tidak semulus dengan apa yang mereka rencanakan. Di situlah muncul berbagai macam persoalan yang saling bersentuhan satu sama lainnya, baik masalah masa depan gerilyawan, masalah kehadiran kembali Belanda dengan NICA bersama pasukan KNIL-nya, masalah ideologi dan banyak lagi persoalan lainnya. Kemudian terpresur oleh sistem nilai budaya Bugis-Makassar sehingga muncullah etnosentrisme yang dikomparasikan dengan etnis daerah lain. Akibat dari akumulasi persoalan itu melahirkan DI/TII di Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Abdul Kahar Muzakkar.

Darul Islam (DI) atau Tentara Islam Indonesia (TII) di Sulawesi Selatan memang

sulit dilepaskan dari sosok Abdul Kahar Muzakkar sebagai sebagai pemimpin di wilayah ini. Walaupun harus diakui bahwa DI/TII dengan pemberontakannya bukan hanya terjadi di Sulawesi Selatan tetapi juga terjadi di Aceh, di Jawa Barat sebagai pusat awal munculnya DI/TII di Indonesia yang diproklamasikan oleh Kartosuwiryo pada 7 Agustus 1949. Keberadaan dan kehadiran DI/TII di beberapa wilayah Indonesia ini tentu bukan tanpa alasan tetapi keberadaannya dengan berbagai alasan-alasan pembenaran. Jika yang kita bicarakan DI/TII tentu alasan pembenarannya adalah memperjuangkan cita-cita mereka, yaitu mencapai suatu negara yang berlandaskan dan atau berasaskan Islam sebagaimana cita-cita Kartosuwirdjo. Sebaliknya golongan republik nasionalis tentu tujuannya berbeda, demikian juga tujuan dari pada PKI tentu berbeda golongan republik nasional dan DI/TII. Semua golongan itu memiliki alasan pembenaran untuk memperjuangkan tujuannya.

Klaim pembenaran antarberbagai pihak telah menjelma menjadi dasar penyelesaian konflik yang terjadi pada masa itu, namun tidak berkesudahan. Tetapi sebaliknya menciptakan konflik baru, baik secara individu maupun secara kelompok. Sebab setiap individu atau kelompok selalu menganggap dirinya benar karena cara berpikir, cara memandang dan tujuan mereka yang berbeda. Apa lagi jika dipresur dan dilatar belakangi dengan kenyataan-kenyataan yang tidak mampu mereka tolerir secara keberibadian, idiologi, secara sosial-budaya (bisa juga dibaca tradisi, etnisitas dan stratifikasi sosial yang berbeda) dan secara politik. Hal itulah yang mengitari gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan.

Gerakan Abdul Kahar Muzakar dalam berbagai sumber selalu diarahkan kepada pemerintah tetapi tidak semuanya benar adanya, karena gerakan itu tidak hanya pada institusi pemerintahan tetapi juga kepada paham-paham yang sangat bertentangan ke-Indonesia-an kita. Gerakan DI/TII merupakan gerakan dan tindakan yang mestinya tidak perlu terjadi dalam negara yang baru merdeka. Perseteruan dan konflik antara DI/TII dengan pemerintah yang berkesudahan dengan tertembaknya Abdul Kahar Muzakkar, tetapi juga masih menyimpang misteri tentang kematian dan kuburannya. Tidak hanya berhenti di situ, tetapi juga terlalu tergesah-gesah jika kita memvonis kesalahan mutlak berada dipihak tertentu.

Selama ini yang banyak didapati dari berbagai sumber menyebutkan bahwa kesalahan mutlak ada pada Abdul Kahar Muzakkar.⁷ Tetapi barangkali tidak ada salahnya kalau kita sedikit terbuka untuk mau mendengar ungkapan perasaan orang-orang yang terlibat, orang yang merasakan dan menyaksikan, serta orang-orang yang menjadi korban. Korban itupun tidak selamanya datang atas perlakuan gerakan DI/TII tetapi juga bisa dari pihak lain. Hal inilah yang mendasari kajian paper ini dilakukan. Penelitian lapangan dengan sumber lisanya memberikan perbedaan informasi atau data-data yang sudah ada selama ini. Sumber lisan yang ditemukan di lapangan menunjukkan adanya kenyataan lain atau keterangan lain terkait dengan sebab akibat terjadinya gerakan DI/TII. Yang mana disebutkan bahwa terjadinya gerakan DI/TII Abdul Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan karena banyak faktor yang saling bersinggungan.

Abdul Kahar Muzakkar sendiri, baik sebelum terjadinya gerakan DI/TII maupun setelah terjadinya gerakan mendapat sambutan dan dukungan dari berbagai pihak, terutama dan sebatas daerah yang pernah diteliti. Bahkan di mata masyarakat pedalaman, Abdul Kahar Muzakkar dikagumi oleh anak-anak kecil pada masa itu, padahal anak-anak itu tidak pernah melihat langsung Abdul Kahar Muzakkar.⁸ Sebaliknya, ada suasana yang mengcekam pada masa gerakan DI/TII Abdul Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan. Anak-anak pada waktu itu menjadi ketakutan, sehingga wajar kalau suasana

pendidikan tidak berjalan dengan baik lantaran mereka takut keluar rumah. Orang-orang yang berkeliaran di luar rumah selalu dicurigai oleh orang-orang yang tidak dikenal, bahkan tidak tahu bahwa mereka yang melakukan pengintaian itu dari pihak mana, apakah pihak DI/TII atau dari pihak pemerintah. Mereka tidak berani berkeliaran dan salah bicara di luar rumah karena dapat berakhir pembunuhan atau lehernya terpotong dengan parang (golok).⁹

PEMBAHASAN

Gerakan DI/TII Sebagai Ujian Idiologi Pancasila

Latar belakang gerakan DI/TII tidak hanya menyangkut masalah politik, militer dan idiologi tetapi juga menyangkut kekecewaan terhadap pemerintah negara RI atas kebijakan penyelesaian masalah gerilya setelah perang kemerdekaan. Sementara para anggota bekas gerilya di Sulawesi Selatan sudah terlanjur mempersatukan diri dan menuntut melalui Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan (KGSS) dipimpin oleh Abdul Kahar Muzakkar. Tuntutan KGSS sebagai gerakan dan aktifitas lokal gerilya memasuki rana politik tingkat nasional. Selain itu, antara pimpinan APRI dan pimpinan partai selalu tidak sejalan pada masa itu. Apa lagi Kolonel A. Kawilarang sebagai Panglima TT VII/Wirabuana yang menguasai Indonesia Timur menolak kehendak Kahar Muzakkar bersama pendukungnya (KGSS) membentuk Brigade Hasanuddin.¹⁰

Penolakan itu bagi KGSS pada umumnya dan bagi Kahar Muzakkar pada khususnya sebagai bagian dari *siri napacce* dalam konsep budaya Bugis-Makassar. Dianggap bagian dari *siri* karena Kahar Muzakkar bersama pendukungnya merasa harga dirinya diinjak-injak oleh pemerintah karena merasa tidak dihargai perjuangannya. Sementara *pacce/pesse* karena merasa pedih dan seberperasaan dengan teman-teman seperjuangannya menanggung malu. Artinya Kahar Muzakkar sangat malu sama teman seperjuangannya karena tidak mampu menjadikannya sebagai tentara reguler dalam satu Brigade Hasanuddin. Sebenarnya sejak 1950-1952 terjadi negoisasi dan perbincangan untuk penyelesaian itu melalui pembentukan CTN, tetapi tidak kunjung selesai dan akhirnya Kahar membentuk Tentara Keamanan Rakyat (TKR) tahun 1952, kemudian menjelma menjadi pasukan DI/TII tahun berikutnya.

Gerakan DI/TII Abdul Kahar Muzakkar memiliki basis pendukung di daerah-daerah pedalaman yang belum dikuasai oleh TNI. Kalau kita perhatikan lebih jauh, para pengikut gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan, maka nampak bahwa mereka terdiri dari berbagai golongan yang ada di dalam masyarakat, seperti kaum bangsawan, ulama, pedagang, guru, dan petani. Keterlibatan kaum bangsawan di dalam gerakan ini memang tidak dapat disangkal arti pentingnya. Sejak awal gerakannya (1950), ketika gagal untuk pembentukan Brigade Hasanuddin, peranan dan pengaruh kaum bangsawan tidak dapat dielakkannya walaupun sebelumnya kurang respek pada bangsawan. Komandan-komandan pasukan terkuatnya pada waktu itu justru berdarah bangsawan seperti Andi Selle (Mattola), Andi Sose, Andi Tenriadjeng, Andi Masse, Andi Patawari merupakan pendukung awal dari gerakan yang dipimpin oleh Abdul Kahar Muzakkar.¹¹

Abdul Kahar Muzakkar orangnya suka membantu orang lain, ahli strategi, tegas dan cerdas, tetapi memiliki sifat keras jika melanggar kebijakannya. Tetapi dengan sikap dan pendirian seperti itu, banyak orang yang menyukainya dan mendukungnya.¹² Sementara pendukung pemerintah dan TNI sangat banyak juga, sehingga sangat susah membedakan jika ada orang asing masuk di kampung, apakah ia pendukung DI/TII atau pendukung pemerintah. Makanya timbul saling curiga mencurigai; dan saling juriga inilah menjadi pemandangan umum dalam masyarakat, anggota masyarakat lebih banyak

tinggal di rumah daripada berkeliaran. Di samping itu, banyak juga anggota masyarakat yang memilih meninggalkan kampung halamannya untuk mencari tempat-tempat yang dianggap lebih aman seperti kota Makassar.¹³

Sebelum Abdul Kahar Muzakkar memproklamasikan gerakan DI/TII-nya pada 7 Agustus 1953, dan terhitung sejak negara Indonesia diproklamasikan kemerdekaannya; Kahar Muzakkar adalah seorang patriot sejati dan perannya di Sulawesi Selatan dan di tingkat nasional sangat luar biasa. Bahkan sejak KGSS-nya tidak dapat diterima secara utuh untuk menjadi satu divisi atau satu brigade, Kahar Muzakkar masih setia kepada negara kesatuan RI. Walaupun kehadiran KGSS itu menjadi bom konflik dan melahirkan gerakan Di/TII nantinya. Bahkan setelah KGSS dibubarkan dan menjadi Corps Tjadangan Nasional (CTN) untuk dipersiapkan menjadi anggota APRI. Kemudian dari CTN berubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) karena gagal dilantik, kecuali pasukan atau batalyon Andi Selle berhasil dilantik atas pendekatan etnisitas bangsawan, tetapi Kahar Muzakkar masih setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Termasuk ketika gerakannya masih CTN dan TKR, ideologi gerakannya masih Pancasila dengan tujuan menuntut untuk menjadi anggota APRI(S). Untuk merealisasikan itu membentuk organisasi-organisasi politik dan organisasi massa (masyarakat), misalnya Partai Pancasila Indonesia (PPI), Koperasi Marhaen Indonesia yang menunjukkan bahwa Abdul Kahar Muzakkar betul-betul nasionalis Pancasila. Bahkan salah seorang informan mengatakan bahwa apa yang ditunjukkan oleh Kahar Muzakkar itu untuk membuktikan siapa yang lebih nasionalis dan lebih Pancasila dengan orang-orang penentu kebijakan di pusat.¹⁴

Periode 1950-1953, tampak Kahar masih sangat menghargai Pancasila, tetapi ketika semua caranya untuk memperjuangkan terbentuknya Divisi Hasanuddin yang tergabung dalam KGSS tidak terwujud akibat banyak kepentingan. Baik kepentingan dalam APRI(S), kepentingan dalam partai politik dan berkembang biaknya paham-paham komunis, kecewa juga karena anggota APRI(S) diambil dari KNIL sementara KNIL sebagai kaki tangan penjajah bangsanya (mana yang lebih nasionalis), termasuk kekecewaannya atas tidak terbentuknya Divisi Hasanuddin.¹⁵ Termasuk dianggap iri karena di Jawa yang tidak begitu luas telah terbentuk 3 divisi, sementara Indonesia Timur yang begitu luas hanya ditangani oleh TT VII/Wirabuana.¹⁶ Itulah sebabnya ia mengambil jalan alternatif, lalu menggabungkan diri dengan NII Kartosuwirdjo.¹⁷ Abdul Kahar Muzakkar juga bersama kelompok gerakannya merasa bahwa dasar negara Pancasila tidak mampu menjawab zamannya sehingga harus dirubah yang lebih nyata, yaitu Negara Islam Indonesia melalui gerakan DI/TII. Pancasila yang dianggapnya baik selama itu, ternyata telah memberi peluang muncul dan berkembangnya golongan ateis dengan partai politiknya PKI yang juga telah masuk dalam tubuh TNI, lebih-lebih dalam masyarakat luas, kemudian melahirkan gerakan pemberontakan Madiun (1948) dan Gerakan 30 September 1965. Belakangan juga muncul paham-paham baru dan melahirkan terorisme, termasuk memunculkan Ahmadiyah dan lain-lain.¹⁸

Gerakan-gerakan tersebut tersebut mestinya tidak terjadi, termasuk Gerakan DI/TII Abdul Kahar Muzakkar andai saja 7 kata dalam usulan sila pertama tidak dirubah atau tidak dirakayasa menurut pak Ahmad (salah satu informan yang dekat dengan Kahar Muzakkar). Pak Ahmad mengatakan bahwa sesungguhnya dalam 7 kata itu sangat mampu mendangkal akan masuknya paham-paham radikal, terutama paham komunisme. Tetapi karena 7 kata itu tidak diabadikan dalam sila pertama Pancasila yang menyebabkan komunisme merajalelah kemana-mana, termasuk di Sulawesi Selatan. Komunis di Sulawesi Selatan bukan baru muncul pada masa gerakan DI/TII tetapi jauh

sebelumnya telah ada, yaitu pada masa pergerakan nasional dengan berdirinya PKI (Paratai Komunis Indie) pada tahun 1922 di bawah pimpinan Maleki.¹⁹ Hal ini menurut pak Ahmad terjadi karena kesalahan awal pada saat diskusi dan pembicaraan tentang dasar negara di BPUPKI. Dimana dalam sila pertama pancasila yang berbunyi “Ketuhanan yang Maha Esa” telah memberi peluang untuk muncul dan berkembangnya golongan ateis dan penganut kepercayaan lainnya di Indonesia. Tetapi seandainya 7 kata “Kewajiban Menjalankan Syariat Agama Bagi Pemeluk-Pemeluknya” dapat diterima dan diabadikan menjadi sila pertama pancasila, maka sila itu mampu menangkal pihak-pihak atau golongan yang tidak memiliki agama seperti ateis atau komunis.

Jika diperhatikan 7 kata tersebut, juga berbeda dengan 7 kata yang kita sering dapatkan dalam berbagai data dan arsip selama ini yang menyebut “Kewajiban Menjalankan Syariat Islam Bagi Pemeluk-Pemeluknya”. Tetapi entah mana yang benar dan mana yang salah, kita masih perlu penelitian yang lebih mendalam. Pendapat ini hanyalah pendapat pihak-pihak tertentu. Tetapi menurut pak Ahmad, bahwa pandangan itu berasal dari Abdul Kahar Muzakkar yang pernah diusulkannya pada saat menjelang rapat BPUPKI.

Kembali pada persoalan 7 kata tersebut di atas memang memiliki pemaknaan yang sangat berbeda secara signifikan antara kata yang mempergunakan kata “Islam” dengan kata yang tidak mempergunakan kata “Islam” tetapi hanya menggunakan kata “agama”. Yang mempergunakan kata Islam barangkali sangat wajar jika penganut agama lain agak keberatan karena para pejuang republik ini bukan hanya golongan Islam tetapi berbagai macam agama. Tetapi menurut pandangan pak Ahmad bahwa menjalankan syariat agama bagi pemeluk-pemeluknya adalah kewajiban bagi semua penganut agama yang ada di Republik Indonesia ini. Jadi bukan hanya agama Islam, tetapi juga agama lain seperti Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan agama-agama lainnya yang diakui oleh negara. Sementara orang-orang atau pihak-pihak yang tidak memiliki agama seperti komunis itu tidak memiliki tempat untuk hidup dan berkembang dalam negara ini andai saja 7 kata itu diterima dan diabadikan dalam sila pertama pancasila.

Pada masa itu juga terjadi persaingan antarpolitical yang juga memiliki ideologi yang berbeda, termasuk munculnya kekuatan komunitas dan berhasil menduduki peringkat 4 dalam perolehan kursi parlemen hasil pemilu 1955. Pada pemilu 1955 terjadi multi partai tetapi hanya 4 partai yang menonjol yaitu partai PNI (57 kursi), Masyumi (57), Nahdatu Ulama/NU (45) dan PKI (39 kursi) tetapi karena Badan Konstituante hasil pemilu 1955 tidak menghasilkan UUD baru maka muncullah dekrit presiden pada 5 Juli 1959 untuk kembali UUD 1945, dan saat itu pula berlaku sistem demokrasi terpimpin.²⁰ Sehingga komunis pada waktu itu memang tidak bisa diabaikan.

Gerakan DI/TII dalam Pusaran Traumatik

Sepanjang tahun 1950 sampai tahun 1965 Sulawesi Selatan situasinya sangat mencekam karena adanya saling curiga mencurigai dalam masyarakat antara golongan yang dianggap pemberontak atau pengikut DI/TII dengan golongan yang berada di luar itu. Masyarakat dalam situasi serba salah, termasuk memunculkan trauma atas aksi-aksi DI/TII dalam masyarakat. Kehadiran DI/TII di Sulawesi Selatan sangat terkait dengan kondisi politik Indonesia secara nasional, terutama perseteruan tokoh-tokoh politik dan tokoh-tokoh dalam tubuh TNI. Dengan kenyataan seperti itu, kemudian dipresur pula oleh kenyataan di daerah yang sedang bergejolak, yaitu munculnya laskar-laskar yang memiliki cita-cita sendiri dalam membangun daerahnya.

Gerakan DI/TII berakibat luas dengan dramatis karena adanya saling membunuh

antara TNI dengan TII, banyak anggota masyarakat biasa yang juga menjadi korban, yang justru tidak melibatkan diri di dalam pertentangan itu. Sesama keluarga juga saling membunuh, terjadi amoral, banyak janda, anak terlantar, pemerkosaan, perkawinan paksa dan lain-lain. Perampokan dan pembumihangusan kampung-kampung di berbagai wilayah di Sulawesi Selatan, diduga dilakukan oleh gerakan DI/TII. Berita itu merupakan berita yang sering diwartakan dalam berbagai media cetak. Berita pembantaian dan pembakaran terjadi dimana-mana seperti di Pinrang, Sidrap, Bone, Luwu dan pada umumnya wilayah bagian utara Sulawesi Selatan yang dianggap paling parah, termasuk bagian selatan tetapi tidak separah dengan bagian utara.²¹

Tetapi pembunuhan tidak selamanya dari pihak DI/TII tetapi bisa juga dilakukan oleh oknum TNI. Salah seorang ibu rumah tangga di Jeneponto pernah saya wawancarai sekitar tahun 2011. Ibu itu bernama Saidah Kanang,²² orang tuanya (bapaknya) meninggal dunia pada saat ia masih berumur sepuluh tahun lebih. Bapaknya meninggal karena ditembak oleh keluarganya sendiri yang berprofesi sebagai tentara sekitar tahun 1956(7). Bapaknya pada waktu itu sebagai kepala lingkungan Pa'rasangan Beru, tetapi orang tuanya dicurigai berafiliasi dengan DI/TII.

Sebelum orang tuanya diambil paksa, ada kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anggota laskar DI/TII. Orang yang dieksekusi oleh anggota DI/TII bernama Saleko, salah seorang yang terbilang kaya di kampungnya Pa'rasangan Beru tetapi tidak pernah memberi sumbangan kalau dimintai oleh anggota DI/TII. Katanya sudah sering dimintai tapi tidak pernah memberi, dan akhirnya beberapa hari kemudian terdengar kabar bahwa Saleko meninggal tertembak di rumahnya. Kematiannya diduga betul bahwa yang melakukan adalah anggota DI/TII pada waktu tengah malam. Tapi naas bagi orang tua Saidah Kanang karena diduga oleh pihak TNI bahwa dia bekerja sama dan memberi peluang kepada anggota DI/TII beraksi. Menurut pengakuan orang tuanya bahwa tidak mungkin dia bersekongkol dengan DI/TII untuk membunuh Saleko karena Saleko adalah om (pamannya) sendiri. Tetapi pihak TNI, sepertinya tidak menerima alasan, sehingga Gompo Daeng Se're nama bapak ibu Saidah Kanang diambil paksa pada malam hari dan dibawa ke daerah BulloE, disanalah Gompo Daeng Se're dieksekusi tembak mati.

Sebelum kasus eksekusi mati Gompo Daeng Se're oleh oknum TNI di BulloE masih sempat berpesan kepada saudara-saudaranya untuk istri dan anak-anaknya. Barulah Gompo Daeng Se're mengihlaskan dirinya pergi dengan butir peluruh keempat yang menembus dadanya. Padahal menurut keluarganya dan tetangga sekampungnya berani bersaksi bahwa dia bukan bagian dari DI/TII. Kasus perilaku oknum TNI yang melakukan penembakan kepada pengikut gerakan DI/TII pimpinan Kahar Muzakkar, bukan hanya di Sulawesi Selatan terjadi tetapi juga di Kolaka Sulawesi Tenggara. Diberitakan bahwa Batalyon 718 waktu melakukan operasi militer untuk menumpas gerakan DI/TII Kahar Muzakkar 1956-1957. Tingkah lakunya tidak jauh berbeda dengan tingkah laku gerilyawan DI/TII. Batalyon ini disebut juga "Batalyon Remaja" atau tentara remaja" yang watak hura-huranya lebih menonjol ketimbang disiplin kemilterannya. Mereka suka menembak, memeras, merampas, dan memperjualbelikan senjata.²³

Pernyataan di atas semakin mempertegas bahwa tidak hanya pengikut gerakan DI/TII dan anggota TNI yang menjadi korban, tetapi juga antara masyarakat umum yang terpaksa menjadi korban akibat adanya dua pihak yang bertentangan dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat. Masyarakat umum yang menjadi korban bukanlah orang-orang yang terlibat dalam sengketa; bahkan mungkin tidak menyadari adanya sengketa itu. walaupun ada yang terlibat, itu disebabkan oleh situasi dan bukan

karena kesadaran atas kebenaran keterlibatan melainkan tidak ada jalan lain baginya; sekedar usaha untuk mempertahankan diri tengah-tengah situasi krisis dan kritis itu. orang kecil ini telah menjadi korban dari ketidaktahuan dan ketidakmampuannya. Mereka adalah orang-orang lemah yang tidak memiliki kemampuan untuk menghindari dari situasi yang melilitnya.²⁴

Selain banyak berita tentang keganasan gerakan DI/TII, tetapi juga banyak berita tentang sisi baik dari gerakan DI/TII sebagaimana yang terjadi di Baraka, Enrekang. Salah seorang informan bercerita, namanya adalah pak Manta.²⁵ Pak Manta adalah pensiunan PNS sebagai guru. Pada masa DI/TII di Enrekang, ia masih kecil dan sering masuk hutan pada malam hari, kemudian pagi dan siang hari masuk kepemukiman penduduk untuk bersekolah. Daerah Baraka dalam beberapa sumber data selalu disebutkan sebagai markas besar DI/TII di Sulawesi Selatan. Hal itu, juga diakui oleh pak Manta karena Baraka sejak tahun 1952 masih hutan lebat, penduduknya masih sangat sedikit dan rumah masih berjauhan. Kebanyakan orang di sana adalah pengikut DI/TII. Tetapi tidak ada aksi-aksi pembakaran, tidak ada perampokan dan aksi-aksi biadab lainnya yang dilakukan oleh DI/TII. Sementara TNI hanya ada di Kota Enrekang, jadi sepenuhnya daerah-daerah pedalaman Enrekang sampai ke Alla perbatasan Toraja dikuasai oleh DI/TII.²⁶

Gerakan DI/TII di Baraka dan sekitarnya, malah sering mendapat simpati masyarakat setempat, walaupun sedikit agak keras kalau perintah dan tugasnya tidak dilaksanakan. Simpati itu terkait dengan persoalan ibadah dan pelaksanaan syariat-syariat agama Islam. Di sana para pengikut DI/TII mengajar membaca Al-Qur-an, mengajar mengambil air wudhu, mengajar sholat dan ibadah-ibadah lainnya. Pada tahun 1950-an di Baraka masyarakatnya masih sangat kurang yang dapat membaca Al-Qur-an padahal dalam catatan sejarah bahwa Enrekang adalah salah satu kerajaan yang menjadikan agama Islam sebagai agama resmi kerajaannya sejak abad XVII, tetapi dalam prakteknya belum terlihat sampai masa pergerakan DI/TII. Di Baraka dan sekitarnya, jangankan membaca Al-Qur-an, mengambil air wudhu saja masih bisa dihitung dengan jari yang dapat melakukannya, apa lagi bacaan dan doa-doa sholat, boleh dikata sangat memprihatinkan, termasuk saya (Kata pak Manta).²⁷

Menurut pak Manta, bahwa di Baraka dan sekitarnya terjadi perkembangan dan kemajuan dalam bidang keagamaan, khususnya agama Islam pada masa gerakan DI/TII yang belum pernah didapatkannya pada masa-masa sebelumnya. Walaupun harus diakui bahwa di Enrekang juga ada kekerasan yang dilakukan oleh gerilyawan DI/TII tetapi tidak sesadis yang terjadi di tempat lain. Tetapi terkhusus di Baraka dan sekitarnya menurut dan seingat pak Manta sejak tahun 1950-an sampai berakhirnya gerakan DI/TII tidak banyak diberitakan.

Kasus-kasus sebagaimana diuraikan di atas menjelaskan bahwa gerakan DI/TII tidak selamanya bringas tetapi juga memiliki sisi positif. Hal itu, juga dapat ditelusuri dengan orang-orang yang berhasil mereka culik dan dijadikan sebagai guru atau pendidik di sekolah-sekolah yang didirikan oleh DI/TII. Tidak sedikit ulamah dan ustadz-ustadz ternama yang mereka pergunakan untuk mengajar dan mendidik anak-anak pengikutnya, sebut saja Haji Abdul Kadir Daud, Haji Abdul Rahman Ambo Dalle dan Haji Abdul Muin dan lain-lain.²⁸ Tetapi juga memang harus diakui bahwa gerakan DI/TII memiliki dampak yang sangat luas dalam masyarakat Sulawesi Selatan, Barat, Tenggara dan menimbulkan traumatik yang luar biasa. Dampak terbesar dirasakan oleh sebagian besar masyarakat adalah masalah keamanan yang mengakibatkan terjadinya pengungsian secara besar-besaran. Terutama daerah-daerah yang menjadi basis gerilyawan DI/TII

yang belum dikuasai oleh TNI.

Akibatnya adalah struktur pemukiman menjadi porak-poranda. Struktur pemukiman yang terbentuk berdasarkan ikatan kekeluargaan seketika menjadi porak-poranda, keluarga mereka sudah banyak yang terbunuh dan banyak juga berhamburan entah kemana. Ada juga fenomena masyarakat yang bermuka dua atau netral, berusaha mengambil jarak diantara dua kelompok yang bertikai. Tetapi menurut gerilyawan dan pihak TNI, kelompok inilah yang sangat berbahaya dan mengakibatkan gerakan mereka mudah terdeteksi. Ironisnya pula pihak militer sering mencurigai mereka bersekongkol dengan kaum pemberontak sebagaimana yang dialami keluarga informan yang bernama Saidah Kanang sebagaimana di jelaskan sebelumnya.

Penyelamatan Diri pada Masa Gerakan DI/TII

Gerakan DI/TII menyebabkan kekacauan dimana-mana di Sulawesi Selatan dan Tenggara, bertahan dan tinggal di kampung menjadi tidak aman. Dampaknya pun dapat menjangkau semua bidang kehidupan manusia dalam masyarakat. Warga berlomba-lomba menyelamatkan diri, dan terjadi pengungsian massal. Selain dengan cara mengungsi, cara apa lagi yang dilakukan warga untuk menyelamatkan diri pada masa gerakan DI/TII. Cara menyelamatkan diri pada masa itu dapat dikatakan cukup bervariasi tergantung situasi dan kondisi masing-masing daerahnya pada masa itu. Tetapi kalau berdasarkan pengalaman dari beberapa informan yang sempat diwawancarai, setidaknya ada 4 cara penyelamatan diri, yaitu pertama adalah mengungsi, kedua adalah masuk hutan, ketiga adalah bertahan diri di kampung dengan mengandalkan diri, mampu dan pintar mengucapkan dua kalimat syahadat dan mau menuruti keinginan para pergerakan DI/TII, termasuk tidak terindikasi sebagai pengikut paham komunis, dan yang empat adalah melakukan migrasi ke daerah lain atau kota lain yang dianggap lebih aman. Tetapi setiap kasus daerah yang satu dengan daerah lain, terkadang berbeda cara untuk menyelamatkan diri pada masa gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan.

Kasus Luwu Timur, khususnya di Kecamatan Mangkutana dan Tomoni, daerah ini menjadi salah daerah yang sangat parah akibat gerakan DI/TII Abdul Kahar Muzakkar , khusus periode 1956-1959. Perlu diingatkan bahwa jauh sebelum masa Gerakan DI/TII, Wilayah ini (mangkutana dan Tomoni) adalah wilayah penempatan kolonisasi oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1937,²⁹ dan juga wilayah penempatan transmigrasi pada tahun 1975 dan tahun 1980-an.³⁰ Di daerah penempatan kolonisasi dan transmigrasi ini banyak menjadi korban pada saat gerakan DI/TII. Menurut pak Kasirun sebagai generasi kedua dari kolonisasi yang ada di Kecamatan Tomoni dan Mangkutana bahwa di daerah ini banyak orang kolonisasi yang menjadi korban pada masa itu karena para kolonisasi kebanyakan berasal dari Jawa. Sementara orang Jawa dicap dan dianggap komunis atau terindikasi terlibat dalam organisasi komunis pada masa pergerakan DI/TII.³¹

Terkait dengan pernyataan di atas, pak Kasirun selalu mendengar cerita itu dari bapaknya ketika berbicara dengan teman-temannya sesama kolonisasi pada masa itu. Namun jika pernyataan itu ditelusuri dalam catatan tertulis atau data tertulis tentang sikap Abdul Kahar Muzakkar dengan komunis dan orang Jawa, pernyataan pak Kasirun itu ada benarnya. Dimana Abdul Kahar Muzakkar menganggap bahwa orang Jawa yang fanatik pancasila dan fanatik komunis melakukan Majapahitsme atau dengan kata lain "Soekarno melakukan Jawanisasi" dan melakukan penjajahan kepada bangsa-bangsa lainnya di Indonesia.³²

Kembali pada persoalan penyelamatan diri kasus Mangkutana dan Tomoni, salah

satu informan berkisah bahwa pada masa gerakan DI/TII Abdul Kahar Muzakkar, mereka mengungsi ke Poso atas inisiatif keluarganya, teman-teman dan atau tetangga-tetangga rumahnya. Setelah mengungsi beberapa lama di Poso, mereka kembali di pemukiman dan penempatan awal mereka ditempatkan sebagai kolonisasi sekitar tahun 1937. Kemudian tidak lama setelah kepulangannya mengungsi di Poso, mereka diharuskan kembali mengungsi ke Palopo, tepatnya di Lamasi oleh pemerintah melalui TNI yang membawa mobil truk. Mobilnya sangat terbatas sehingga kita harus berdesak-desakan, dan bahkan ada yang tidak sempat naik dimobil karena terlambat datang atau tidak mendapatkan tempat. Jadi tidak sedikit juga yang tinggal di kampung dan berusaha menyelamatkan diri dengan cara mereka masing-masing. Sehingga tidak sedikit diantara mereka yang menjadi korban. Selama kurang lebih dua tahun mereka mengungsi, mereka dipulangkan kembali ke kampungnya di Wonorejo, Mangkutana karena sudah dianggap aman.³³

Menurut pak Siwah bahwa pada masa gerakan DI/TII ada tiga cara untuk menyelamatkan diri sepanjang yang ia saksikan di Mangkutana dan Tomoni, pertama adalah mengungsi ke Poso atau ke Lamasi; kedua adalah mereka lari masuk ke hutan yang ada di sekitar Mangkutana, terutama bagi mereka yang memiliki anak kecil lebih dari satu orang, dan yang ketiga adalah mereka tetap bertahan dengan catatan pasrah menyabung nyawa atau mau mengikuti perintah dan keinginan dari para anggota gerakan. Biasanya sebagian para pergerakan, juga tidak langsung membantai tetapi melalui tanya jawab sebelumnya. Jika mereka mendapati warga yang mampu mengucapkan dua kalimat syahadat secara pasih dan mau mengikuti maksud dan tujuan dari para pergerakan, maka mereka (warga) tidak dibunuh tetapi bergabung, dan ada juga diantaranya dipergunakan tenaganya untuk memasak karena gerombolan juga manusia yang merasakan rasa lapar. Walaupun juga ada kasus pembantaian tanpa ada tanya jawab sebelumnya.³⁴

Selain pengalaman dari 2 keluarga di atas masih banyak pengalaman dari keluarga yang merasakan pahit getirnya di Luwu Timur, khususnya di Mangkutana dan Tomoni pada masa gerakan DI/TII Abdul Kahar Muzakkar. 2 pengalaman keluarga di atas adalah keluarga yang masih selamat dari gerakan DI/TII yang memilih menyelamatkan diri dengan cara mengungsi dan dengan cara masuk hutan walaupun bukan bagian dari DI/TII. Berikutnya adalah keluarganya yang menjadi korban gerakan DI/TII Abdul Kahar Muzakkar di Mangkutana dan Tomoni, yaitu keluarga pak Sukiman.³⁵ Pak Sukiman merupakan generasi kedua dari kolonisasi yang ditempatkan di Luwu Timur atau tepatnya sekarang adalah Kecamatan Tomoni. Pak Sukiman lahir di kecamatan ini pada tahun 1945. Pahit getirnya membuka lahan pada saat penempatan pertama para kolonisasi, dia tidak begitu merasakannya karena dia belum lahir. Penderitaan dan kepedihan yang ia rasakan hanyalah hasil transfer yang nampak diseraut wajah orang tuanya pada saat orang tuanya menceritakan tentang masa lalunya pada saat membuka lahan pertanian.

Namun yang paling terasa di hati dan pikirannya adalah kasus pergerakan DI/TII pada tahun 1950-an. Menurut pak Sukiman bahwa pada masa gerakan DI/TII yang mereka ingat sangat mengerikan karena banyak orang yang dibantai begitu saja tanpa banyak pertanyaan. Para penduduk, baik kolonisasi maupun orang pada umumnya yang berhasil ditangkap, mereka diikat secara berantai lalu digiring ke tempat tertentu, lalu di tempat itulah mereka ditebas satu persatu sampai meninggal dunia. Di samping itu menurut pak Sukiman dan menurut orang tuanya bahwa rumah-rumah yang mereka bangun dengan susah payah, dibakar habis oleh para pergerakan. Namun beruntung bagi keluarganya karena tidak ada yang meninggal. Tetapi saudara orang tuanya dan

tetangganya banyak yang dibantai, dan salah satu keluarga yang ditebas pada waktu itu dan masih hidup setelah ia diparangi badannya dan terpotong kakinya; ia berhasil hidup pada waktu itu karena pura-pura meninggal, dan ia baru meninggal betul 3 bulan sebelum peneliti datang meneliti di Mangkutana dan Tomoni.

Namun keluarga pak Sukiman berhasil melarikan diri sebelum para pergerakan datang membantai dan membakar pemukiman penduduk. Keluarga mereka pergi mengungsi di Lamasi atas bantuan pemerintah karena pihak pemerintah ada yang sengaja datang membawakan mobil truk dan diperintahkan untuk cepat naik mobil karena kampung ini akan diserang oleh para pergerakan DI/TII. Akhirnya merekapun mengungsi ke Lamasi selama kurang lebih 2 tahun, dan kejadian itu terjadi sekitar tahun 1956, 1957 dan 1958. Para pengungsi akhirnya kembali lagi ke kampungnya di Tomoni, walaupun dengan penuh kesusahan dan penderitaan karena tidak ada lagi bahan makanan yang dapat dimakan. Padi yang sudah menguning dan siap dipanen pada saat mau pergi mengungsi, kini sudah habis terbakar dan tidak tersisa lagi. Rumahnya pun sudah habis terbakar sehingga tidak ada lagi tempat untuk berteduh dari terik matahari dan derasny hujan. Pada saat itulah dirasakan betul, betapa menderitanya para pengungsi yang kembali lagi di Tomoni. Sehingga apa saja dimakan asal bisa bertahan hidup, misalnya makan rerumputan, batang pisang dan syukur-syukur kalau dapat umbi-umbian liar, terkadang juga dapat buah pisang, baik yang masak maupun yang mentah, diambil dan dimakan sekedar menyambung hidup.

Selain keluarga dari pihak orang tuanya yang menjadi korban, juga keluarga calon istrinya. Penderitaan yang dialami oleh keluarga pak Sukiman, juga sangat diderita oleh keluarga calon istrinya, dan bahkan lebih menderita. Keluarga saudara dari orang tuanya dan atau tetangganya yang dibantai masih terngia dipikirkannya, terutama orang tua yang akan menjadi istrinya (keluarga mertua pak Sukiman), tepatnya adalah bapak dari istrinya yang ditembak dan ditebas. Sementara calon mertua perempuannya selamat dari maut. Ia disuruh menyiapkan makanan pada saat itu, dan alhamdulillah ia masih hidup sampai sekarang. Ibu mertua pak Sukiman juga hadir waktu peneliti mewawancarai pak Sukiman yang ikut menceritakan pengalamannya secara terbata-bata sambil terisak-isak dan meneteskan air matanya mengenang kejadian itu. Kejadian itu sesungguhnya sangat cepat tetapi sangat lama dirasakan, apa lagi ibu itu masih berusaha menyelamatkan anak laki-lakinya yang ia gulung bersama dengan kasur kapuk pada saat itu supaya sang anak tidak dilihat oleh kaum pergerakan, dan alhamdulillah anaknya yang ada dalam gulungan kasur tersebut masih hidup, sekarang anak itu sudah ada di Pasangkayu.³⁶

Mungkin tidak ada salahnya kalau pada kesempatan ini menceritakan keluarga pada pak Podimin. Pak Podimin ini usianya 95 tahun pada saat diwawancarai tahun 2018, ia tinggal di Desa Lestari, Kecamatan Tomoni dan kini tinggal sebatangkara karena kedua orang tuanya sudah meninggal dunia, termasuk kedua istrinya juga sudah meninggal dunia dan tidak satu istrinya itu yang memberinya anak. Makanya sejak 30 tahun lebih yang lalu, pak Podimin mengadopsi anak perempuan satu orang. Anak angkatnya inipun sudah berkeluarga dan sudah punya rumah tangga sendiri, dan bahkan sudah punya anak yang mengharuskan mereka berpisah. Sekarang pak Podimin tinggal dalam sebuah gubuk yang sangat sempit, kira-kira ukurannya 3x3 meter persegi, berlantai tanah. Di dalamnya ada tempat tidur berbahan kayu tanpa berkasur dan tanpa spreya atau kain. Di dalamnya juga ada dapur tungku yang berantakan dan meja kayu yang hampir rubuh, termasuk peralatan lainnya tanpa sekat-sekat, tetapi menyatu sebagai satu kesatuan. Pekerjaan bapak Podimin sekarang adalah tukang becak yang kadang dapat

penumpang dan kadang tidak dapat, lagi pula bapak Podimin sudah tua sekali, tenaganya sudah sangat terbatas dan kalau dilihat secara fisik, beliau sangat kurus kerin tak terurus.

Menurut pengalaman bapak ini bahwa dia datang di sini bersama orang tuanya pada saat ia masih berumur 15 tahun. Pada saat itu ada sekitar 15 orang dari keluarganya ikut kolonisasi, mereka naik kapal laut dan tiba di Pelabuhan Wotu pada masa itu. Kemudian dari pelabuhan itulah mereka dibagi-bagi dan ditempatkan di barak-barak, lalu diberi parang dan kapak untuk membuka lahan pertanian. Tetapi masih beruntung karena diberi makan oleh Pemerintah Belanda selama kurang lebih 6 bulan, setelah itu tidak ditanggung lagi, tetapi harus hidup sendiri dari lahan yang dibuka sendiri dan ditanami sendiri. Sementara pengalaman ia pada masa pergerakan DI/TII, ia menyebutnya sangat kacau. Di sana sini terjadi pembantaian dan pembakaran, dan ia sendiri berusaha menyelamatkan diri dengan cara masuk hutan yang ada di sekitar perkampungannya. Ia masuk hutan bukan bergabung dengan DI/TII dan bukan juga untuk melawan DI/TII tapi semata-mata tindakan penyelamatan diri. Berbeda dengan para kolonisasi lainnya yang kebanyakan lari ke daerah perbatasan, seperti lari masuk ke Poso dan ada yang ke Palopo maupun Lamasi. Ia memilih lari bersembunyi ke hutan karena ia masih percaya sistem penanggalan Jawa bahwa walaupun ia lari ke mana saja, ia pasti terbunuh kalau memang ajal kita terbunuh. Apa lagi jika lari begitu saja tanpa mengetahui hari-hari yang baik dan hari-hari yang naas. Di hutan ada orang lain selain dirinya yang juga menyelamatkan diri, tetapi tidak sering berbicara satu sama lain karena di hutan juga sangat berbahaya, disamping golongan pergerakan yang ditakuti, juga di hutan masih banyak binatang buas.³⁷

Mencermati kasus di Mangkutana dan Tomoni pada masa pergerakan DI/TII, mungkin ada baiknya, juga disampaikan di sini pengalaman atau wawancara saya dengan pak Kasirun.³⁸ Pak Kasirun ini adalah generasi kedua dari kolonisasi yang berasal dari Kebumen dan tinggal di Kecamatan Tomoni sejak penempatan kolonisasi orang tuanya sebagai mantri. Sekarang ia bekerja sebagai PNS yang bertugas di Kecamatan Tomoni. Pada saat pergerakan DI/TII, ia masih kecil. Ia bisa menceritakan kasus gerakan DI/TII sepanjang yang ia tahu dan melihatnya. Tetapi lebih banyak ia dapatkan dari cerita orang tuanya. Kata pak Kasirun bahwa saya bisa menceritakannya karena saya juga diceritakan oleh orang tua. Orang tuanya banyak menyaksikan dan mengalami masa itu. Apa lagi orang tuanya pada masa itu adalah sekdes (sekretaris Desa Muliasri). Menurut pak Kasirun bahwa kasus DI/TII di Mangkutana, puncak-puncaknya terjadi sekitar tahun 1958.

Pak Kasirun menceritakan bahwa orang-orang Jawa banyak dibantai oleh gerakan DI/TII pada masa itu. Menurut pemahaman orang Jawa, bahwa para pergerakan atau orang-orang yang menjadi pasukan DI/TII adalah notabene orang-orang Bugis yang tidak suka kepada orang-orang Jawa. Orang Jawa yang ada di sini dianggap terlibat organisasi komunis. Kenapa banyak orang Jawa yang dibantai pada masa itu tanpa tanya jawab karena anggota gerakan DI/TII pada masa itu, juga sudah ada yang tinggal di sini (Mangkutana dan Tomoni). Ia mengetahui aktifitas-aktifitas orang Jawa yang terlibat dan yang tidak terlibat, maka dengan muda membantai yang dianggap terlibat, sementara yang dianggap tidak terlibat, selamat dan tidak diapa-apai. Secara politik ada pemahaman bahwa memang ada orang Jawa yang terlibat pada organisasi komunis tapi ada juga yang berpendapat bahwa orang Jawa dilibatkan dalam organisasi komunis. Menurut orang tua pak Kasirun bahwa memang orang Jawa ada yang terlibat tetapi ada juga yang dilibatkan.

Menurut pak Kasirun bahwa banyak orang Jawa di sini yang terlibat organisasi

PKI, tapi banyak diantara mereka yang tidak menyadari bahwa mereka dilibatkan atau sekedar ikut-ikutan. Jadi keterlibatan orang Jawa yang ada di sini dalam organisasi komonis memang ada dan tidak bisa dipungkiri. Tokoh-tokohnya ada yang terlibat seperti kasus Margani dari Bonebone yang membawa ke sini pada tahun 1958, sehingga terjadi pembantaian pada waktu itu. Pada waktu itu pula memang sudah ada PKI masuk di Luwu Timur dan dibantai oleh DI/TII. Pada masa itu banyak orang mengungsi, ada yang bertahan di kampungnya, ada yang ke Poso, ke Lamasi, dan ada yang masuk hutan, bapak saya (pak Kasirun) juga masuk hutan.

Jika melihat sikap dan gerakan DI/TII Abdul Kahar Muzakkar, memang terlihat condong pada perlawanan terhadap paham-paham komunis, tanpa menghiraukan asal etnisnya. Kebetulan saja bahwa perkembangan paham ini di Sulawesi Selatan karena dibawa oleh orang-orang Jawa. Demikian juga yang terjadi di Mangkutana dan Tomoni. Namun selain di tempat ini (Mangkutana), memang pasukan gerakan DI/TII, juga sangat gencar mengejar penganut paham-paham komunis di tempat lain seperti gerakan Putra Rimba di Palopo, Dompea di Kajang, La Ribbi di Soppeng, dan Cap Peddi di Bicing.³⁹ Sehingga memang terlihat gerakan DI/TII sangat membenci dan ingin memusnahkan orang-orang yang terlibat paham komunis.

Pada masa itu pula terjadi persaingan organisasi politik yang berimbas pada masalah sosial. Orang-orang Bugis dianggap golongan yang berafiliasi dengan organisasi Masyumi pada masa itu, sementara orang-orang Jawa yang ada di Mangkutana banyak yang berafiliasi dengan organisasi komunis. Menurut pak Kasirun yang ia peroleh dari orang tuanya bahwa pada masa itu harus diakui bahwa ada orang Jawa yang ikut kegiatan organisasi komunis. Hal ini harus diluruskan bahwa bukan orang Bugis yang membantai orang Jawa tetapi lebih kepada paham yang diikutinya, karena saya (pak Kasirun) sendiri dan keluarganya sampai sekarang hidup rukun dengan semua etnis di sini, lebih-lebih etnis Bugis. Tahun 1980-an ketika orang Bugis datang ke sini (Mangkutana dan Tomoni) masih banyak orang Jawa yang takut karena tidak paham sejarah pada masa gerakan DI/TII. Tetapi saat ini mereka sudah sangat cerdas dan mampu membedakan peristiwa sejarah yang terkait dengan kasus DI/TII.

Pasca gerakan G30S PKI 1965 saja, khususnya tahun 1970-an, di Mangkutana masih banyak yang melakukan wajib lapor karena dianggap daerah ini basis komunis atau sebagian warganya pernah terlibat organisasi komunis. Cuma kategorinya yang berbeda-beda sehingga wajib lapornya berbeda-beda pula. Jadi di sini tidak ada diskriminasi, walaupun memang pada masa itu, yang dianggap terindikasi anggota PKI sulit mendapatkan pelayanan umum dari pemerintah, misalnya surat kelakuan baik tidak diberikan, tetapi itu bukan hanya orang Jawa saja yang diperlakukan seperti, tetapi semua etnis. Rumpung keluarga saya (pak Kasirun) di sini 90% PNS, dan tidak merasakan adanya diskriminasi.⁴⁰ Terkait dengan gerakan DI/TII dengan ambisinya mengejar pengikut paham komunis, namun setelah gerakan DI/TII berhasil ditumpas, paham komunis bukannya habis tapi masih banyak. Tetapi setelah G30S PKI berhasil ditumpas pada 1965, maka wilayah-wilayah yang terindikasi pengikut paham komunis didata dan diwajibkan wajib lapor. Jadi sesungguhnya pengikut paham komunis itu bukan hanya berhadapan dengan pasukan gerakan DI/TII tetapi juga pemerintah (TNI) pada masa Orde Baru.

Hal yang menarik juga diuraikan di sini, terkait dengan penyelamatan diri pada masa gerakan DI/TII, bahwa tidak sedikit dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan mengalami nasib yang sama karena daerahnya dikuasai oleh gerakan DI/TII, khususnya yang jauh dari kota kabupaten dan masih sulit dikuasai oleh TNI. Pada daerah-daerah

tersebut, banyak orang tua yang memiliki anak, mengharuskan mereka untuk migrasi dari daerahnya ke Kota Makassar yang dianggap lebih aman. Namun menariknya ada beberapa kasus informan yang pernah diwawancarai mengakui dan menganggap bahwa ia merasa diuntungkan dengan gerakan DI/TII di kampungnya (terlepas dari kebetulan atau tidaknya). Ia berhasil mengenyam pendidikan tinggi dan mendapatkan posisi seperti sekarang akibat adanya gerakan DI/TII di kampungnya. Seandainya pada waktu tidak terjadi gerakan DI/TII orang tuanya tidak akan migrasi ke Kota Makassar, dan juga mungkin saya (informan) tidak mengenyam pendidikan di perguruan tinggi.

KESIMPULAN

Perjuangan dan pengorbanan rakyat Indonesia telah menghasilkan suatu bangsa yang kita cintai ini. Namun masih banyak terjadi pergolakan pada pasca awal kemerdekaan. Baik pergolakan menentang para kolonialis Belanda yang ingin menjajah kembali bangsa Indonesia. Maupun pergolakan dalam negeri yang tidak puas dengan penataan Indonesia tanpa memperhitungkan kemajemukan dan pluralisme budaya dan bentuk perjuangan. Kemudian perjuangan diteruskan pada masa revolusi dan berlanjut pada tahun-tahun berikutnya yang paling perih dan menyedihkan. Yaitu perjuangan melawan saudara sendiri (sesama anak bangsa Indonesia) yang berlangsung antara tahun 1950 sampai tahun 1965.

Perjuangan dan pengorbanan pada masa perang saudara adalah perang ketidakpuasan atas pemerintahan Indonesia yang multi faktor. Terutama faktor geilyawan Sulawesi yang berhasil membentuk KGSS dengan tujuan mempersiapkan hasil terburuk KMB di Belanda, tetapi juga menuntut masa depan KGSS untuk dijadikan tentara reguler dalam satu kesatuan yang utuh menjadi Divisi Hasanuddin yang tidak dapat diterima oleh pemerintah pusat; muncullah faktor lain yang terkait dengan budaya Bugis-Makassar "*siri na pacce/pesse*"; munculnya etnosentrisme; tidak mampunya pemerintah pusat memberi kebijakan yang adil setiap daerah berdasarkan nilai-nilai kulturalnya, tetapi yang ada adalah kebijakan yang diseragamkan; muncul dan berkembang biaknya paham komunis di Jawa dan merambah ke Sulawesi Selatan; diterimanya KNIL sebagai anggota APRIS; terjadinya konflik antarpertai dengan idiologinya masing-masing di tingkat nasional; adanya persaingan dalam tubuh Angkatan Darat dan faktor-faktor lain yang saling terkait satu sama lain. Semua faktor-faktor itu berkontribusi dalam proses muncul dan berkembangnya gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan.

Sementara faktor yang lebih dominan bermain atas gerakan DI/TII kalau dilihat perjuangan Kahar Muzakkar dan para gerilyawan di Sulawesi Selatan adalah tuntutan KGSS yang tidak diterima sebagai anggota APRI secara keseluruhan dalam satu Divisi Hasanuddin. Kedua adalah faktor ideologi, khusus paham-paham komunis yang sangat pesat perkembangannya, termasuk di Sulawesi Selatan. Terbukti dalam berbagai macam kebijakan DI/TII Kahar Muzakkar menyinggung paham komunis yang harus dibersihkan. Gerakan pembunuhannya pun lebih banyak ditujukan kepada orang-orang yang terlibat dan terindikasi berafiliasi dengan komunis, sementara faktor lain adalah faktor pelengkap.

Gerakan Abdul Kahar Muzakkar bersama KGSS-nya; CTN dan TKR-nya sejak 1950 sampai Juli 1953 masih sangat nasionalis dan pancasilais karena masih berharap adanya penyelesaian para gerilyawan. Tetapi persoalan pemerintah semakin rumit dengan adanya persaingan kepentingan, termasuk dalam partai politik dengan idiologinya masing-masing, dalam tubuh TNI, termasuk tersingkirnya Bambang Supeno dan Zulkfli Lubis di jabatan teras AD yang menjadi teman baik Kahar Muzakkar pada masa awal

perkembangan AD. Jadi situasi zaman yang tidak mendukung perjuangan Kahar Muzakkar dengan anggota KGSS-nya di TNI. Sehingga sulit jalan baginya jika budaya *siri napacce/pesse* tidak dapat dikopromikan dengan zamannya. Kecuali Kartosuwirdjo dengan DI/TII-nya yang memberinya jalan, dan jalan itulah yang mereka tempuh, sehingga dapat dikatakan bahwa DI/TII bagi Kahar Muzakkar adalah bentuk pelarian. Sesungguhnya jiwanya ada dalam karir militer tetapi tidak mungkin dia kembali karena tembok budaya menjadi tamen besarnya.

Bendera DI/TII pun mulai dikibarkan sejak 7 Agustus 1953 untuk mewujudkan Negara Islam Indonesia. Sepanjang tahun 1953 sampai tahun 1965 Sulawesi Selatan situasinya sangat mencekam karena adanya saling bunuh membunuh, adanya saling curiga mencurigai dalam masyarakat antara golongan yang dianggap pemberontak atau pengikut DI/TII dengan golongan yang berada di luar itu. Masyarakat dalam situasi serba salah, termasuk memunculkan trauma yang sangat mendalam. Akibatnya pun sangat meluas, struktur pemukiman yang terbentuk berdasarkan ikatan kekeluargaan seketika menjadi porak-poranda, keluarga mereka sudah banyak yang terbunuh dan banyak juga berhamburan entah kemana. Mengakibatkan juga hancunya struktur ekonomi akibat perang total, mobilisasi umum, strategi bumi hangus, dan blokade ekonomi, kerusakan rumah dan struktur pertanian, timbulnya kemiskinan dan kelaparan.

Keadaan yang serba kacau dan tidak menentu itu, membuat masyarakat kocar-kacir untuk menyelamatkan diri. yaitu mengungsi secara massal dan besar-besaran; menyelamatkan diri dengan masuk hutan, masuk hutan tidak selamanya bergabung dengan DI/TII atau melawan DI/TII, tetapi warga masyarakat masuk hutan semata-mata menyelamatkan diri; ketiga adalah bertahan diri di kampung dengan mengandalkan diri, mampu dan pintar mengucapkan dua kalimat syahadat dan mau menuruti keinginan para pergerakan DI/TII, termasuk tidak terindikasi sebagai pengikut paham komunis, dan yang empat adalah melakukan migrasi ke daerah lain atau kota lain yang dianggap lebih aman. Tetapi setiap kasus daerah yang satu dengan daerah lain, terkadang berbeda caranya untuk menyelamatkan diri pada masa gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan. Setiap daerah pula tidak selamanya mempergunakan 4 cara penyelamatan diri itu sebagaimana yang diuraikan di atas.

DAFTAR PUSTAKA

- Gonggong, Anhar. 2004. *Abdul Qohhar Mudzakkar: Dari Patriot Hingga Pemberontak*, Yogyakarta: Ombak
- Nasution, A.H. 19813. *Memenuhi Panggilan Tugas, Jilid 2: Kenangan Masa Gerilya*, Jakarta: Gunung Agung
- Sillars Harvey, Barbara. 1989, *Pemberontakan Abdul Kahar Muzakkar : Dari Tradisi ke DI/TII*, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti
- Bardosono. 1995. *Peristiwa Sulawesi Selatan 1950*, Djakarta: Jajasan Pustaka Militer
- Depdikbud. 1981. *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Sulawesi Selatan*. Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Ujung Pandang: Proyek inventarisasi dan dokumentasi sejarah nasional
- Edward L.Poelinggomang, dkk. 2005. *Sejarah Sulawesi Selatan Jilid II*, Makassar: Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) propinsi Sulawesi Selatan

- Radik Djarwadi CS. 1972. "Naskah Sedjarah Corps Hasanuddin: Pradjurit Tempur dan Pembangunan", Sekretaris Djenderal CORHAS MCMLXXII, Makassar
- Suhartono. 1994. *Sejarah Pergerakan Nasional Dari Budi Utomo Sampai Proklamasi 1908-1945*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Abdullah, Taufik (editor). 1990. *Sejarah Lokal di Indonesia: Kumpulan Tulisan*, LIPI dan Gadjah Mada University Press: Yogyakarta
- Handara, Ali. 2000. "Gejolak Keamanan di Sulawesi Tenggara (1950-1965): Di-TII Abdul Kahar Muzakkar, Militer, dan PDK", dalam *Dunia Militer di Indonesia: Keberadaan dan Peran Militer di Sulawesi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Sulistyo, Bambang. 2000. "Dari Pahlawan ke Pemberontak: Perubahan Sebagai Pendukung Republik ke DI/TII di Sulawesi Selatan 1950-1951", dalam *Dunia Militer di Indonesia: Keberadaan dan Peran Militer di Sulawesi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Chaniago, J.R. 2002. *Menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia: Peranan Pemimpin Lokal Dalam Dinamika Politik Di Sulawesi Selatan dan Sumatera Timur 1950*, Yogyakarta: University Gadjah Mada Press
- Sjamsu, M. Amral. 1985. "Transmigrasi: Gagal Ataukah Berhasil", Dalam: *Transmigrasi di Indonesia 1905-1985*, edisi baru, Jakarta: Universitas Indonesia Press

Informan

- Wawancara dengan Andi Wana pada Minggu tanggal 12 Juni 2011 di Hotel Nirwana, Kota Pinrang (Pensiunan PNS P&K, Keluarga besar Andi Selle, dan Anhar Gonggong)
- Wawancara dengan Pak Cakkodo di rumahnya Kota Pinrang pada hari Senin tanggal 13 Juni 2011 (Pengawal khusus Andi Selle dan dekat dengan Kahar Muzakkar)
- Wawancara dengan bapak Ahmad, pada hari Selasa 14 Juni 2011 di rumahnya Kota Pinrang (dekat dengan Abdul Kahar Muzakkar)
- Wawancara dengan Andi Naga pada Rabu 15 Juni 2011 (Anggota militer, pengikut Andi Selle, tetapi juga banyak mengetahui Kahar Muzakkar)
- Wawancara dengan Saidah Kanang di Jeneponto pada 2011
- Wawancara dengan bapak Eka Candra pada Sabtu 03 Januari 2018 di Mangkutana, Tomoni (Transmigrasi lokal dari Toraja)
- Wawancara dengan bapak Siwah pada Minggu 04 Januari 2018 di Mangkutana, Tomoni (anggota kolonisasi generasi pertama)
- Wawancara dengan bapak Podimin pada Minggu 04 Januari 2018 di Mangkutana dan Tomoni (anggota kolonisasi generasi pertama)

Wawancara dengan bapak Kasirun pada Senin 05 Maret 2018 di Mangkutana, Tomoni (Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Kecamatan Tomoni, keturunan kolonisasi generasi kedua)

Wawancara dengan bapak Sukiman pada Senin 05 Maret 2018 di Mangkutana, Tomoni (keturunan kolonisasi generasi kedua di Mangkutana dan Tomoni).

Wawancara dengan Pak Manta, pada 12 Agustus 2018 di Hotel Wifa Delia, Kota Enrekang

CATATAN AKHIR

1. Suhartono, 1994, *Sejarah Pergerakan Nasional Dari Budi Utomo Sampai Proklamasi 1908-1945*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Hlm. 6-8
2. Wawancara dengan Pak Cakkodo di rumahnya Kota Pinrang pada hari Senin tanggal 13 Juni 2011
3. Anhar Gonggong, 2004. *Abdul Qahhar Mudzakkar: Dari Patriot Hingga Pemberontak*, Yogyakarta, Ombak, hlm. 164-165
4. Ali Handara. 2000. "Gejolak Keamanan di Sulawesi Tenggara (1950-1965): Di-TII Abdul Kahar Muzakkar, Militer, dan PDK", dalam *Dunia Militer di Indonesia: Keberadaan dan Peran Militer di Sulawesi*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, hlm. 454
5. Barbara Sillars Harvey, 1989, *Pemberontakan Abdul Kahar Muzakkar : Dari Tradisi ke DI/TII*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, hlm. 189; Anhar Gonggong, 2004. *Abdul Qahhar Mudzakkar: Dari Patriot Hingga Pemberontak*, Yogyakarta, Ombak, hlm. 18
6. Anhar Gonggong, *Op.Cit.*, hlm. 188-190
7. Bambang Sulistyono, 2000. "Dari Pahlawan ke Pemberontak: Perubahan Sebagai Pendukung Republik ke DI/TII di Sulawesi Selatan 1950-1951", dalam *Dunia Militer di Indonesia: Keberadaan dan Peran Militer di Sulawesi*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, hlm. 316
8. Wawancara dengan Andi Wana pada Minggu tanggal 12 Juni 2011
9. *Ibid*
10. Anhar gonggong, *Op.Cit.*, hlm. 18-20
11. Anhar Gonggong, *Op.Cit.*, hlm.229-230
12. Wawancara dengan Pak Cakkodo salah seorang pengikut setia Abdul Kahar Muzakkar di rumahnya Kota Pinrang pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2011
13. Wawancara dengan Andi Wana di rumahnya Kota Pinrang pada Minggu tanggal 12 Juni 2011
14. *Ibid.*
15. Wawancara dengan bapak Ahmad, dekat dan banyak mengetahui Abdul Kahar Muzakkar di rumahnya Kota Pinrang pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2011
16. Bambang Sulistyono, *Op.Cit.*, hlm. 299-303
17. Anhar gonggong, *Op.Cit.*, hlm. 240-241
18. Wawancara dengan bapak Ahmad, *Op.Cit.*
19. J.R. Chaniago. 2002. *Menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia: Peranan Pemimpin Lokal Dalam Dinamika Politik Di Sulawesi Selatan dan Sumatera Timur 1950*, Yogyakarta, University Gadjah Mada Press, hlm. 134
20. Anhar Gonggong, *Op.Cit.*, hlm. 5-8

21. Wawancara dengan Andi Wana *Op.Cit.*
22. Wawancara dengan Saidah Kanang di Jeneponto pada 2011
23. Ali Handara, *Op.Cit.*, hlm. 470-472
24. Anhar Gonggong, *Op.Cit.*, hlm. 17
25. Wawancara dengan Pak Manta, pada 12 Agustus 2018 di Hotel Wifa Delia, Kota Enrekang
26. *Ibid.*
27. Wawancara dengan Pak Manta, *Op.Cit.*
28. Anhar Gonggong, *Op.Cit.*, hlm.232-233
29. M. Amral Sjamsu, 1985. "Transmigrasi: Gagal Ataupun Berhasil", Dalam: *Transmigrasi di Indonesia 1905-1985*, edisi baru, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 62
30. Wawancara dengan bapak Eka Candra pada Sabtu 03 Januari 2018 (Transmigrasi lokal dari Toraja)
31. Wawancara dengan bapak Kasirun pada Senin 05 Maret 2018 (Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Kecamatan Tomoni, keturunan kolonisasi generasi kedua)
32. Anhar Gonggong, *Op.Cit.* hlm. 290-291
33. Wawancara dengan bapak Siwah pada Minggu 04 Januari 2018 (anggota kolonisasi)
34. Wawancara dengan bapak Siwah *Op.Cit.*
35. Wawancara dengan bapak Sukiman pada Senin 05 Maret 2018 (keturunan kolonisasi generasi kedua di Mangkutana dan Tomoni).
36. Wawancara dengan bapak Sukiman *Op.Cit.*
37. Wawancara dengan bapak Podimin pada Minggu 04 Januari 2018 (anggota kolonisasi generasi pertama)
38. Wawancara dengan bapak Kasirun *Op.Cit.*
39. Ali Handara. 2000. *Op.Cit.*, hlm. 454
40. Wawancara dengan bapak Kasirun *Op.Cit.*